

Erosi Demokrasi: Memikirkan Ulang Keberadaan Oligarki dalam Melorotnya Perwujudan Demokrasi di Kolombia Pasca-Perang Saudara hingga 2022

Anastasya Jesslyn Hartono Salim¹, Jonathan Kay Christian², Keisya Diva Kurniawan³

¹Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6092101042@student.unpar.ac.id

²Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6092101033@student.unpar.ac.id

³Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6092101020@student.unpar.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, the democratization process is often hampered not by power struggles, but by the presence of 'invisible hands' (certain organizations, elites, and groups) that penetrate the government structure and disrupt the circulation of democratization in a country. This case occurred in the Colombian government, where there is a specific pattern of nonstate social order - companies, political elites, mafia, and so on - that influences the government structure of a country, and plays the role of power behind the official government. This causes an issue that affects the lives of the Colombian people and government, namely the existence of mafia elites who infiltrate various aspects of society, including the law and government of Colombia itself. The research method used is qualitative descriptive based on data collection through books, journals, articles, and other reliable sources. This paper aims to explain how the presence of mafia elites in Colombia affects the country's democracy and civil society life using Robert Michels' Iron Law of Oligarchy theory. The results of the study show that the existence of drug cartels uses power to make unilateral decisions by taking actions that ignore the official government and the voices of civil society, the dominance of elites and criminals by launching violence and repression for their own interests, and the apathy of the Colombian people towards the existing government system, seen from their indifference to the leaders elected during the election.

Keywords: *democracy, elite, oligarchy, iron law of oligarchy, mafia, Colombia*

ABSTRAK

Dewasa ini, proses demokratisasi seringkali terhambat bukan lagi oleh gonjang-ganjing kekuasaan, namun oleh karena adanya 'tangan-tangan tak terlihat' (organisasi, elit, dan golongan tertentu) yang mempenetrasi struktur pemerintahan, dan mengganggu sirkulasi demokratisasi suatu negara. Kasus ini terjadi dalam pemerintahan Kolombia oleh karena eksistensi lembaga nonformal—perusahaan, elit politik, mafia, dan sebagainya—yang mempengaruhi struktur pemerintahan suatu negara, dan memainkan lakon-lakon kekuasaan di balik pemerintahan resmi. Terdapat sebuah isu yang mempengaruhi kehidupan rakyat dan pemerintahan Kolombia, yaitu keberadaan elit-elit kriminal yang menginfiltrasi berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk hukum dan pemerintahan Kolombia itu sendiri. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif-kualitatif yang ditengarai oleh pengumpulan data melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber terpercaya lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kehadiran elit mafia di Kolombia mempengaruhi demokrasi negara dan kehidupan masyarakat sipil dengan menggunakan teori Iron Law of Oligarchy milik Robert Michels. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya kartel narkoba menggunakan kekuasaan untuk mengambil keputusan secara sepihak dengan melakukan tindakan yang mengabaikan pemerintah resmi dan suara-suara masyarakat sipil, dominasi para elit serta kriminal dengan melancarkan sebuah kekerasan dan represi demi kepentingan sendiri, serta apatisnya rakyat Kolombia terhadap sistem pemerintahan yang ada, terlihat dari ketidakpedulian mereka terhadap pemimpin yang dipilih saat pemilu.

Kata Kunci: *demokrasi, elit, oligarki, iron law of oligarchy, mafia, Kolombia*

Pendahuluan

Kolombia merupakan salah satu negara yang mumpuni dalam segi geografis, ekonomi, sosial-budaya jika dibanding negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Meskipun demikian, dimensi politik Kolombia sangatlah rentan terhadap krisis. Keberadaan elit politik serta golongan kecil yang secara langsung maupun tidak membajak sirkulasi demokrasi di negara tersebut. Jejak tragis kemerosotan kadar demokrasi di negara tersebut akrab dikenal sebagai *la violencia* atau *'the violent'* atau era 'kekerasan'. Padahal, sistem demokrasi Kolombia tertuang dalam pasal 1, Undang-Undang Dasar 1991, yang berbunyi demikian: "Kolombia adalah negara sosial di bawah supremasi hukum, diselenggarakan dalam bentuk republik kesatuan, terdesentralisasi, dengan otonomi unit teritorialnya, demokratis, partisipatif, dan pluralistik, berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia, karya dan solidaritas negara. individu yang menjadi miliknya, dan prevalensi kepentingan umum."¹

Semua idealisme yang terkandung dalam konstitusi menemui sebuah gejolak dimulai pada era *la violencia* dimulai pada tahun 1948 silam, persis ketika calon presiden dari Partai Liberal, yakni Jorge Eliécer Gaitán dibunuh pada tahun 1948. Setelah pembunuhan Gaitán di jalan kota Bogota pada bulan April 1948, penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, dan massa tanpa pemimpin menguasai kota selama dua hari, menghancurkan kantor, majalah, dan tempat tinggal pejabat Partai Konservatif.² Partai konservatif dituding mendalangi pembunuhan dan menjadi kambing hitam atas peristiwa tersebut sehingga mengakibatkan eskalasi konflik yang masif, mulai dari peningkatan mobilisasi petani dan organisasi-organisasi paramiliter yang berbasis dari kedua partai yang berseteru. Era ini turut merenggut kurang lebih 200.000 korban jiwa dan kebanyakan merupakan rakyat sipil.³

Sebuah sistem baru kemudian diterapkan yang tidak seperti yang lain dalam sejarah Kolombia—dan tentu saja tidak seperti negara lain di Amerika Latin—memulai program reformasi administrasi pada tahun 1958. Kekhasannya terletak pada kenyataan bahwa ia didirikan di atas koalisi antara Partai Konservatif dan Partai Liberal, hanya dua partai politik yang dianggap representatif di Kolombia kala itu. Persyaratan koalisi yang tepat ditetapkan dalam amandemen formal konstitusi negara, dan durasi yang diharapkan adalah enam belas tahun.⁴ Selain mendorong pertumbuhan nasional, rekonsiliasi antara kedua kubu ini melihat reformasi guna memperkuat pembangunan kembali kredibilitas institusional dan stabilitas politik. Kesepakatan tahun 1958, atau Front Nasional dibuat akibat dari sebuah hasil kehancuran tatanan sipil konvensional Kolombia dan kehancuran total perdamaian sipil negara itu.

Dibandingkan dengan tahun 1945–1949, 1958 dilihat membuka lebih banyak peluang bagi berbagai golongan untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan.. Keputusan untuk membuat sistem bipartisan dalam Front Nasional memang menghentikan era *la violencia*, yang pada dasarnya adalah perang saudara antara partai Liberal dan Konservatif di akhir 1940-an dan 1950-an. Hanya saja, sistem politik ini tidak memiliki cukup transparansi dan demokrasi, karena mekanisme *check and balances* nyaris hilang. Front Nasional kemudian menyebabkan kekuasaan terkonsentrasi di tangan-tangan elit politik secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, sistem mengizinkan perlawanan dari pihak-pihak luar

¹ "Constitución Política de Colombia [Colombia]", 27 Oktober 1991, <https://www.refworld.org/docid/3dbd4b224.html>

² Ibid, 556.

³ Forrest Hylton, *Evil Hour in Colombia* (London: Verso, 2006), 39.

⁴ Roderick T. Groves, "The Colombian National Front and Administrative Reform," *Administration & Society* 6, no. 3 (1974): 316-317, <https://doi.org/10.1177/009539977400600303>.

selain Front Nasional, tetapi bukan konflik atau perbedaan pendapat di dalam kedua partai tersebut. Munculnya gerakan-gerakan bawah tanah juga dipengaruhi oleh aspirasi sosial yang tidak terpenuhi.⁵

Kondisi ini melahirkan kemunculan kekuatan-kekuatan nonformal dalam hal komersial dan politik yang digenggam oleh segelintir orang atau organisasi seperti kartel, mafia, dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang secara *de facto* paling dirugikan oleh eksklusi politik adalah kelompok-kelompok yang secara ideologis terhubung dengan sayap kiri karena kedua partai (liberal dan konservatif) yang berkolaborasi itu sama-sama bagian dari elit ekonomi negara. Kemunculan kelompok-kelompok ini menyebabkan mobilisasi banyak kelompok sosial, baik di daerah perkotaan dan pedesaan, dan akhirnya pembentukan gerilyawan sayap kiri, sesuai dengan pemahaman populer bahwa unsur-unsur nondemokrasi mendorong kekerasan. Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) adalah dua yang terbesar. Gerilyawan menggunakan cara yang melanggar hukum, termasuk pemerasan, tebusan, dan penculikan, untuk mendanai operasi mereka pada akhir tahun 1960-an.⁶

Tahun 1986 menandakan berakhirnya era Front Nasional ketika tak ada lagi sistem bipartisan yang menguasai kancah perpolitikan, sehingga mengakibatkan desentralisasi di banyak wilayah. Hasilnya, adalah keberadaan sebagian elit yang bergerak dari pemerintahan lokal menuju nasional, dan kemunculan kartel serta mafia narkoba. Kemunculan entitas ini memberikan para elit kesempatan. Pada akhir 1990-an, gerilyawan FARC Kolombia dan milisi paramiliter Autodefensas Unidas de Colombia (United Self Defence Forces of Colombia atau AUC) sayap kanan telah mengambil kendali budidaya dan pemrosesan narkoba di seluruh pedesaan.⁷ Tahun 1970-1980an, Kolombia mulai menjadi produsen narkoba seperti kokain terbesar dunia (hingga 90%). Hingga tahun 1998, hampir dua pertiga unit FARC dan setengah dari unit ELN terlibat dalam perdagangan narkoba, yang memberi para elit tersebut puluhan juta dolar untuk mendanai kegiatan mereka.⁸

Kolombia mengalami pergolakan politik dan sosial ekonomi yang dramatis ketika tahun 1980-an berganti dengan tahun 1990-an sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi secara bersamaan di tingkat nasional dan internasional. Perubahan masif terjadi karena upaya beberapa kelompok bersenjata untuk membangun pemerintahan negara di atas pemerintah, termasuk gerakan gerilya, organisasi paramiliter, dan gembong-gembong narkoba, yang mempenetrasi struktur kekuasaan negara.⁹ Berdasarkan hal tersebut pula, kemunculan elit-elit baru dalam sistem politik Kolombia turut menjadi salah satu pemicu terjadinya erosi demokrasi. Keberadaan mereka tidak dapat dilepaskan dari riwayat politik empat hingga lima dekade ke belakang. Para elit tersebut justru menjadi pemain utama lakon perpolitikan di Kolombia padahal, mereka mengacaukan sistem

⁵ Rensselaer W. Lee and Francisco E. Thoumi, "The Political-Criminal Nexus in Colombia," *Trends in Organized Crime* 5, no. 2 (1999): 62-63, <https://doi.org/10.1007/s12117-999-1034-1>.

⁶ Juan F. Vargas, "Colombia: Democratic but Violent?," *SSRN Electronic Journal*, no. 1 (2022): 14-16, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4012757>.

⁷ Bruce Bagley, "Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in The," *WOODROW WILSON CENTER UPDATE ON THE AMERICAS*, Agustus 2012, [https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/AmericaEconomia%20\(SKP's%20Articles\)/11-2011_Drug_Trafficking.pdf](https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/AmericaEconomia%20(SKP's%20Articles)/11-2011_Drug_Trafficking.pdf).

⁸ Douglas Farah, "Colombian Rebels Seen Winning War," *The Washington Post*, 10 April 1998, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/04/10/colombian-rebels-seen-winning-war/90b463f0-bcdf-4749-ae0f-fe6ac43efa69/>

⁹ Gabriel Murillo-Castano and Victoria Gomez-Segura, "Institutions and Citizens in Colombia: The Changing Nature of a Difficult Relationship," *Social Forces* 84, no. 1 (2005): 2-4, <https://doi.org/10.1353/sof.2005.0116>.

demokrasi yang seharusnya. Dalam demokrasi rakyat-lah (*demos*) menjadi aktor utamanya dan berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan anomali tersebut, timbul sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana keberadaan elit-elit politik tersebut mampu mengancam tatanan ideal demokrasi, sesuai dengan konstitusi, di Kolombia? Maka dari itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya demokrasi di Kolombia dengan menilik besarnya pengaruh para elit yang berkuasa di berbagai aspek kehidupan salah satu negara di Amerika Latin tersebut. Hingga tahun 2022, walaupun Kolombia merupakan salah satu negara demokrasi yang berdiri di Amerika Latin, negara ini masih mengalami permasalahan-permasalahan yang mengancam esensi dari sistem demokrasi itu sendiri, seperti banyak terjadinya kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰

Kerangka Pemikiran

Iron Law of Oligarchy merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Jerman, Robert Michels. Pada tahun 1911, dalam analisisnya, Michels membahas tentang kecenderungan suatu organisasi yang memiliki dasar egalitarian atau memiliki prosedur yang demokratis, tetapi organisasi tersebut tetap akan mengarah kepada sistem oligarki.¹¹ Oligarki sendiri merupakan sebuah sistem dominasi dari kelompok-kelompok kecil yang mencoba menguasai organisasi maupun pemerintahan yang ada. Situasi terjadinya kontrol dari para elit terhadap organisasi atau kelompok-kelompok yang mempunyai keanggotaan besar lainnya disebut sebagai '*iron law of oligarchy*'.¹² Michels mengasumsikan bahwa dasar dari sifat oligarkis adalah keniscayaan dari suatu bentuk kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh dibutuhkanya sebuah sentralisasi sebuah organisasi dengan cakupan yang luas. Faktor lainnya adalah sifat dari massa itu sendiri, yaitu ketidakdewasaan serta ketidakmampuan untuk menguasai massa yang besar, sehingga solusinya dari segala permasalahan adalah dibutuhkanya kepemimpinan hirarki.¹³

Dalam organisasi politik, Robert Michels menganggap partai modern di dunia kontemporer selalu mencoba memberikan landasan seluas mungkin bagi organisasinya sendiri dan untuk mengikat sebanyak mungkin orang ke dirinya sendiri melalui hubungan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengambilan keputusan yang kuat, dan kecenderungan ini digenggam oleh tindakan perluasan tanggung jawab yang diserahkan pada kelompok elit di pucuk-pucuk pimpinan organisasi. Bahkan dalam yang didasari oleh semangat demokratis, pengambilan keputusan untuk melaksanakan tindakan yang paling penting, tentu saja diserahkan kepada segelintir individu. Sistem pendelegasian yang ditunjuk idealnya menjadi representasi daripada kekuatan massa. Setiap organisasi partai yang telah mencapai tingkat kerumitan yang cukup besar menuntut sebuah penunjukkan wakil untuk mewakili sejumlah orang yang mengabdikan semua kegiatan mereka untuk pekerjaan partai. Namun, keberadaan elit dapat memotong sistem ideal ini, karena kekuasaan dalam organisasi jatuh ke tangan

¹⁰ "Colombia," *Freedom House*, 10 Juli 2022, <https://freedomhouse.org/country/colombia/freedom-world/2022>

¹¹ Darcy Leach, "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences," in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ed. James Wright (Peoria, Illinois: Elsevier, 2015), 201-206.

¹² *Ibid.*

¹³ Robert Rohrschneider, "How Iron Is the Iron Law of Oligarchy?," *European Journal of Political Research*, (1994): 242-243.

segelintir orang dalam hirarki organisasi yang dapat mengatur penunjukkan dan sebagainya.¹⁴ Ada sejumlah asumsi Michels sebagai berikut:

Pertama, adanya kontrol dan pengaruh yang besar dari para elit terlihat melalui pengambilan keputusan yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir elit penguasa.¹⁵ Para pemimpin secara alami akan mengembangkan keinginan untuk mempertahankan posisi otoritas mereka dan mampu memanipulasi massa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh para elit.¹⁶ Elit, sekaligus representasi dari rakyat seringkali membawa kepentingan-kepentingan mereka, untuk direalisasikan melalui sebuah pengaruh dengan ‘mempenetrasi’ sistem kekuasaan itu sendiri. Minoritas-minoritas di dalam sebuah negara seringkali menjadi pengatur jalannya kekuasaan itu sendiri. Sistem ini memerlukan adanya pendelegasian, yaitu delegasi mewakili massa dan melaksanakan kehendaknya.

Kedua, pemimpin atau para elit yang berkuasa mempunyai dominasi yang kuat dalam banyak aspek, seperti keuangan, lembaga disiplin, komunikasi, dan aspek lainnya yang berguna demi memperoleh keuntungan pribadi. Kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan sebuah kelompok, cenderung mengembangkan minat untuk mempertahankan status dan keuntungan dari posisi kepemimpinan suatu organisasi. Didorong oleh 'keinginan untuk mendominasi' yang seharusnya melekat, 'minoritas, setelah mencapai posisi ini, akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri – bahkan ketika itu berarti bertentangan dengan kepentingan keanggotaan – dan akan menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk tetap menggaet kekuasaan.¹⁷

Ketiga, sebagian besar anggota lebih memilih untuk bersikap apatis dan melimpahkan permasalahan yang ada terhadap kepemimpinan atau para elit yang bersedia untuk menerimanya. Massa tidak mampu bekerja sama sebagai satu kesatuan tubuh, merumuskan, dan melaksanakan penilaian dengan cepat sehingga harus mempercayai para pemimpin untuk melaksanakan tugas-tugas vital ini demi kepentingan terbaiknya.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, Michels menganggap bahwa proses demokrasi yang beranggotakan oligarki, merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Ini disebabkan oleh dua dimensi kausalitas, yakni bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi kosakata rakyat di sini bermakna ganda.

Rakyat pada satu sisi memang menjadi bagian dari proses berlangsungnya negara, tetapi oleh karena kosakata dan pengetahuan tentang esensi demokrasi representatif yang terbatas, rakyat akan senantiasa mewakili dan mendelegasikan suara mereka melalui para wakil-wakilnya.¹⁹ Selain itu, dengan pertimbangan munculnya golongan elit di kalangan organisasi-organisasi politik, di mana terdapat kecenderungan tingkat relasi kekuasaan (rendah dan tinggi) antara wakil dan mereka yang diwakili. Ini memunculkan sebuah distribusi kewenangan yang tidak merata, di mana pemimpin partai memiliki kekuasaan atas sumber daya, akses, dan dimensi kapabilitas, yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan keistimewaan khusus (seperti penunjukan langsung anggota oleh pemimpin partai) dan

¹⁴ Ibid, 28.

¹⁵ Ibid, 21.

¹⁶ Ibid, 207-208.

¹⁷ Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* (Kitchener, Ontario: Andesite Press, an imprint of Creative Media Partners, 2018), 365.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, 127.

hukuman kepada anggota. Akibatnya, pemisahan fungsional antara pemimpin partai dan anggota ini mengacu pada aspek realitas organisasi sebagai elitisasi partai.²⁰ Banyak dari karakteristik ini dimiliki oleh negara dan partai politik. Kekuasaan pemimpin dihasilkan oleh hasrat bawaan para pemimpin akan kekuasaan. Maka itu menyebabkan terciptanya oligarki terhadap sistem demokrasi yang telah ada.²¹

Analisis

a. Keputusan Sepihak di Tangan Kelompok Kriminal dan Kartel Narkoba

Di Kolombia, perdagangan narkoba menjadi komoditas perdagangan yang meningkat secara signifikan di pertengahan tahun 1970-an. Komoditas narkoba yang diperdagangkan pertama kali merupakan ganja yang mulai meningkat di Kolombia pada pertengahan hingga akhir 1960-an. Tingkat ekspor kala itu, berhasil penyelundup menembus ‘pasar’ Amerika Serikat dan persentase pendapatan yang sebenarnya dikembalikan ke Kolombia.²² Kemunculan eksistensi kartel narkoba secara spesifik meningkat pada 1980-an sebagai akibat dari meningkatnya permintaan kokain di negara-negara tetangga, seperti AS. Kartel Medellin dan Cali, adalah dua dari sekian banyak contohnya. Keberadaan kartel narkoba tentunya ditentang oleh pihak negara, karena terbiasa melakukan kekerasan yang parah, sikap tanpa kompromi, dan kesiapan untuk secara terbuka menentang otoritas resmi (secara hukum) sebuah negara.²³

Kartel narkoba sendiri merupakan salah satu aktor yang memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi negara Kolombia akibat besarnya kekayaan yang mereka peroleh melalui perdagangan narkoba tersebut. Walaupun begitu, kartel narkoba turut berpengaruh dalam berlangsungnya penurunan demokrasi di Kolombia dengan segelintir tindakan mereka yang melanggar unsur-unsur demokrasi, seperti penunggaan kewajiban untuk membayar pajak, membunuh pemimpin organisasi lokal, teror sebagai bentuk intimidasi terhadap pejabat yang dipilih oleh publik, dan sebagainya.²⁴ Para kartel narkoba dan pemberontak lainnya seringkali melakukan tindakan-tindakan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari masyarakat sipil maupun pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari saat pandemi COVID-19 berlangsung, di mana mereka melangsungkan *lockdown* sejumlah kota di Kolombia berdasarkan keputusan mereka sendiri.

Contohnya, di kota Tumaco, sebuah tempat yang dipenuhi oleh penduduk miskin dilarang untuk menangkap ikan sehingga hal ini akan menyebabkan hilangnya sumber untuk mendapatkan makanan maupun uang oleh kelompok kartel dan kriminal bersenjata. Selain itu, terdapat pemberlakuan jam malam yang lebih ketat dibandingkan peraturan pemerintah setempat, ketika penduduk termasuk pedagang kaki lima harus berada di rumah paling lambat jam lima sore.²⁵

²⁰ Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* (Kitchener, Ontario: Andesite Press, an imprint of Creative Media Partners, 2018), 209-210.

²¹ Ibid, 127.

²² Jonathan Hartlyn, “Drug Trafficking and Democracy in Colombia in the 1980s,” (1993): 10.

²³ John P. Sullivan and Robert J. Bunker, “Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords,” *Small Wars & Insurgencies* 13, no. 2 (2002): 42-44, <https://doi.org/10.1080/09592310208559180>.

²⁴ Kenneth E. Sharpe (1993) The military, the drug war and democracy in Latin America: What would Clausewitz tell us?, *Small Wars & Insurgencies*, 4:3, 56-86, DOI: 10.1080/09592319308423057

²⁵ Joe Danie, “Colombian Cartels Killing Those Who Don't Obey Their Covid-19 Lockdowns,” *The Guardian*, 15 Juli 2020, <https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/15/colombia-cartels-rebel-groups-coronavirus-lockdown-human-rights-watch>.

Beberapa ancaman pun dilontarkan bagi penduduk dan komunitas yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan diberikan hukuman dengan cara diserang bahkan dibunuh.²⁶ Maka, mandat yang diberlakukan oleh kelompok kartel tersebut sebenarnya telah bertentangan dengan keinginan masyarakat setempat hingga membuat mereka menderita tanpa persediaan kebutuhan dan makanan yang layak.²⁷

Pada Mei 2022 pula, kota-kota hingga perdesaan di Kolombia Utara ditutup oleh salah satu kartel narkoba ternama di Kolombia, yaitu Gulf Clan atau AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). Hal ini dilakukan sebagai pembalasan akibat ekstradisi oleh Dairo Antonio Úsuga atau lebih dikenal sebagai Otoniel ke Amerika Serikat.²⁸ Pembalasan tersebut berimbas kepada hak-hak masyarakat sipil yang terancam, karena kelompok bersenjata tersebut melakukan serangan, melakukan blokade di kawasan pemukiman masyarakat, menutup bisnis, jalan, dan transportasi yang ada. Ancaman penembakan dan pembakaran kendaraan masyarakat sipil dilakukan untuk mengintimidasi para warga untuk mengikuti keinginan kelompok tersebut. Minimnya tanggapan pemerintah terhadap peristiwa ini menambah ketidakpuasan dan kecemasan masyarakat akan demokrasi di Kolombia, terutama dalam menyampaikan ide-ide politik mereka.²⁹

Walaupun para elit tersebut melakukan banyak kekacauan dan bertindak dengan cara yang salah terhadap kehidupan penduduk Kolombia, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keinginan kelompok elit. Minimnya usaha dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negara memberikan kesempatan bagi para elit untuk beraksi karena masyarakat sendiri tentunya membutuhkan pemimpin yang dapat mengatur warganya, Hal ini sesuai dengan teori *Iron Law of Oligarchy*, ketika kontrol dan pengaruh dari para elit terlihat melalui pengambilan keputusan oleh segelintir elit penguasa untuk kepentingan pribadi mereka, seperti mempertahankan posisi otoritas serta kemampuan untuk membuat massa mengikuti apa yang diinginkan oleh para elit. Dengan adanya ancaman pula menambah ketakutan para penduduk untuk terus mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh para elit sehingga mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau bentuk protes yang mana akan melanggar hak mereka untuk berpendapat. Maka dari itu, demokrasi di Kolombia terlihat akan terus menurun dengan adanya bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak sipil lainnya oleh para elit yang berkuasa.

b. Dominasi Organisasi Kriminal ‘Don Berna’ dan AUC

Keberadaan organisasi-organisasi kriminal, yang juga turut membantu perputaran transaksi narkoba membentuk sebuah lingkaran elit baru, dengan bertindak sebagai penguasa ‘di belakang layar’ asli panorama politik Kolombia. Salah satu pentolan organisasi kriminal yang turut mempengaruhi proses demokratisasi di negara tersebut. Salah satu organisasi beranggotakan para elit adalah AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) yang terlibat dalam perdagangan dan penyediaan

²⁶ Vandana Rambaran, “Colombian Cartels Killing Anyone Who Doesn't Obey Coronavirus Lockdown Orders: Report,” *Fox News*, 16 Juli 2020, <https://www.foxnews.com/world/colombian-cartels-coronavirus-lockdown-orders>.

²⁷ Ibid.

²⁸ Joe Daniels, “‘It’s Total Terror’: Colombian Cartel Retaliates over Kingpin’s Arrest,” *The Guardian*, 8 Mei 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/gulf-clan-cartel-armed-strike-colombia-otoniel-dairo-antonio-usuga>.

²⁹ Inigo Alexander, “Terrifying’: Days of Terror under Colombia’s Gulf Clan Cartel,” *Al Jazeera*, 12 Mei 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/terrifying-days-of-terror-under-colombias-gulf-clan-cartel>.

logistik serta transportasi untuk mengirim narkoba jenis kokain ke berbagai negara—paling banyak Amerika Serikat—namun ada negara lain. AUC sendiri adalah milisi paramiliter 1980-an yang dibentuk oleh gembong narkoba untuk melakukan berbagai penculikan dan pemerasan.³⁰

Tindakan ini digunakan untuk mendanai operasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan untuk memperkaya para komandannya. Organisasi ini dipimpin oleh Murillo Bejarano alias Don Berna yang berpangkat ‘inspektur jenderal’ di AUC. Ia menjabat sebagai komandan *de facto* kelompok tersebut dan mengendalikan semua operasi perdagangan narkoba, termasuk pengiriman semua kokain dan pengelolaan keuangannya. Hal ini diperparah dengan masuknya Berna ke AUC yang turut mengembangkan ekspansi pengaruh dengan skala besar-besaran, terutama bagi tentara paramiliter dan juga yang mencakup banyak organisasi kriminal.³¹

Berna juga turut ‘membeli’ aparaturnasional, yakni Jenderal Mauricio Santoyo. Koneksi antara dua aktor, yakni Santoyo dengan Berna tetap bertahan bahkan setelah ia mengambil peran sebagai kepala keamanan Alvaro Uribe pada tahun 2002. Ia akan mempertahankan pekerjaan itu hingga tahun 2006. Dalam hal akses dan pengaruh, ini adalah salah satu peran paling berpengaruh di kepolisian, bahkan menyaingi kepala polisi nasional.

Santoyo telah memperoleh akses ke presiden dan pernah menjadi birokrasi paling berpengaruh di Kolombia. Ia membantu untuk menggunakan kekuatan yang diembannya untuk mengamankan pemindahan polisi yang menolak membantu Berna dengan menempatkan mereka di pos-pos berbahaya dan terisolasi. Ia juga turut memberikan organisasi kriminal itu persediaan intelijen secara teratur.³² Persekutuan kotor antara Berna dan Mauricio bermula pada saat keduanya berada di Medellin (Berna menguasai Medellin setelah kematian Escobar). Santoyo adalah seorang perwira karir yang ditempatkan untuk menangani masalah penting bagi pemerintah, memberikan akses ke banyak informasi dan kontak. Santoyo adalah contoh tipikal elit birokrasi dan perwira karir yang menangani kasus penting bagi pemerintah, memberinya akses ke banyak sumber daya, hubungan dengan politisi, dan pengetahuan tentang penegakan hukum di negara tersebut.³³ Oleh karena itu, akses menuju birokrasi diperoleh dengan menggunakan kuasa dan kriminalitas.

Berna memiliki otoritas mutlak atas pihak-pihak keamanan. Posisi ini menjadikannya sang penguasa tunggal yang dipegang Berna memberinya kemampuan. Selain beroperasi sebagai perusahaan kecil dan khusus, kombinasi dalam jaringannya yang luas terkadang hanya berfokus pada satu tindakan terlarang, seperti pembajakan mobil atau pembunuhan. Akibat perbuatannya, Jenderal Santoyo dimasukkan ke penjara saat mereka menyelidiki dia untuk pencucian uang dan kegiatan keuangan dan kriminal gelap yang menghubungkannya dengan kelompok paramiliter sayap kanan dan perdagangan narkoba yang terkenal kejam.³⁴ Dampak keberadaan Berna di Kolombia, terkhusus di wilayah Medellin menggerus proses demokrasi hingga ke akar-akarnya. Ia tak hanya mengembangkan

³⁰ “Quick Guide | the Colombian Conflict,” BBC News (BBC), accessed July 12, 2022, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/quick_guides/05/americas_the_colombian_conflict/html/2.stm.

³¹ U.S. Attorney's Office (USAO), “LEADER OF COLOMBIAN TERRORIST ORGANIZATION AUC PLEADS GUILTY TO NARCOTICS TRAFFICKING CHARGES,” USDOJ: US Attorney's Office - Southern District of New York, 2008, <https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/index0212.html>.

³² “Colombia Elites and Organized Crime: 'Don Berna',” InSight Crime, 3 Februari 2020, <https://insightcrime.org/investigations/colombia-elites-and-organized-crime-don-berna/>.

³³ Ibid.

³⁴ Eli Moskowitz, “Colombia: Former General Jailed for Aiding Narco-Trafficking Group,” OCCRP, 2020, <https://www.occrp.org/en/daily/12237-colombia-former-general-jailed-for-aiding-narco-trafficking-group>.

kejahatan terorganisir di Kolombia. Namun ia juga terus membangun sebuah pola hubungan yang dibentuk dengan elit birokrasi, sehingga dapat mengeliminasi sumber-sumber keterlibatan rakyat yang menjadi hulu dari demokrasi.

Hingga tahun 2007, delapan anggota Kongres Kolombia telah dipenjara dalam skandal itu, dan menteri luar negeri, sekutu dekat Uribe, telah dipaksa untuk mengundurkan diri. Mantan kepala polisi rahasia Kolombia, Jorge Noguera, ditangkap bulan lalu karena diduga memberikan informasi kepada para pemimpin paramiliter tentang organisasi buruh sayap kiri. Alvaro Uribe, presiden Kolombia, dan Montoya memiliki hubungan yang panjang dan kuat. Montoya akan menjadi perwira Kolombia berpangkat tertinggi yang dituduh dalam krisis politik yang berkembang di negara itu tentang hubungan antara politisi kuat dan milisi ilegal. Menteri luar negeri sebelumnya, setidaknya satu gubernur negara bagian, anggota parlemen, dan direktur kepolisian nasional semuanya telah dikaitkan dengan skandal itu, yang telah mengguncang pemerintahan Uribe.³⁵

Keterlibatan AUC dengan pemerintahan Uribe juga terlihat mengakar dalam budaya korup di Kolombia dari eratnya hubungan mereka dengan beberapa pejabat-pejabat tinggi di Kolombia, terutama dalam masa jabatan Ivan Duque. Bahkan, ranah hukum dan keadilan tidak memiliki imunitas akan intervensi kelompok ini yang terlihat dari keberadaan Francisco Barbosa, *prosecutor general* yang telah berkali-kali melindungi Uribe dan beberapa oknum pemerintahan lainnya yang tertuduh atas pelanggaran hukum, terutama dalam hal korupsi. Bahkan, keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada AUC, yang terlihat dari kegagalan investigasi Barbosa terhadap bukti-bukti yang menunjukkan bahwa “Democratic Center” yang dimiliki oleh Ivan Duque ternyata bekerja sama dengan organisasi-organisasi kriminal dari Kolombia dan Meksiko pada tahun 2018 lalu.³⁶ Maka dari itu, mengaitkannya kembali, akar keterlibatan organisasi-organisasi kriminal ini telah tertancap pada inti-inti dari pemerintahan yang esensial.

Banyaknya serangan oleh pasukan gerilya, organisasi paramiliter, dan pengedar narkoba melumpuhkan sistem pemerintahan Kolombia. Selain itu, keberadaan organisasi tersebut membahayakan demokrasi Kolombia karena meningkatnya kekerasan politik serta meningkatnya kekerasan terkait narkoba terhadap polisi dan sistem peradilan pemerintah.³⁷ Kelompok-kelompok kriminal, serta kartel-kartel narkoba yang menjadi *mastermind* seringkali menoleransi dan/atau membantu mengorganisasi represi paramiliter mengakibatkan efek pada berbagai kelompok sosial memiliki efek langsung yang merugikan pada demokrasi. Dorongan kekerasan adalah yang paling langsung dan nyata. Petani, pekerja, gerilyawan, editor surat kabar, aktivis sosial dan politik, anggota polisi dan militer, jaksa dan hakim, menteri kabinet, dan pejabat senior pemerintah lainnya telah dibunuh oleh pengedar narkoba.

Jika dihubungkan dengan teori, keberadaan organisasi kriminal memiliki motif untuk berkuasa. Teori *Iron Law of Oligarchy* menegaskan bahwa ada kecenderungan kelompok untuk berkuasa besar, maka mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya, dan celakanya

³⁵ Paul Richter and Greg Miller, “Colombia Army Chief Linked to Outlaw Militias,” *Los Angeles Times*, 25 Maret 2007, <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-mar-25-fg-colombia25-story.html>.

³⁶ Adriaan Alsema, “Why State Mafia Allies Threaten Colombia's Democracy,” *Colombia News | Colombia Reports*, 23 Mei 2022, <https://colombiareports.com/why-state-mafia-allies-threaten-colombias-democracy/>.

³⁷ William Aviles, “Paramilitarism and Colombia's Low-Intensity Democracy,” *Journal of Latin American Studies* 38, no. 2 (2006): 380, <https://doi.org/10.1017/s0022216x06000757>.

melalui proses demokratis. Struktur organisasi telah sangat berpengaruh terhadap sumber-sumber kekuasaan dalam hal ini, karena penerima manfaat, yakni elit atau pemimpin organisasi sering mengkondisikan kontribusi mereka pada penggunaan strategi guna mencapai tingkat efisiensi keuntungan yang tinggi, kesemuanya itu mendorong organisasi ke arah ‘oligarkisasi’.³⁸

c. **Apatisme Rakyat Kolombia dalam Pemerintahan**

Sistem demokrasi di Kolombia diwarnai oleh budaya korupsi yang mengakar. Salah satunya adalah keberadaan sistem pembelian suara. Kartel-kartel mafia di Kolombia tidak hanya terlibat dalam bisnis dan perekonomian, tetapi juga dalam politik, terutama dalam kampanye pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, para pemilih yang telah ditargetkan oleh beberapa orang yang disebut sebagai *handyman*, harus memilih pilihan yang diarahkan dan menunjukkan sertifikat pemilihan dan tanda pengenal mereka untuk diperiksa kembali. Jika memang sesuai, maka para *handyman* akan memberikan bayaran yang telah dijanjikan.³⁹ Bahkan, para oknum-oknum memiliki sistem transportasi untuk mobilisasi rakyat dari daerah-daerah pedalaman ke tempat pemilihan umum jika suara mereka diberikan untuk politikus yang sesuai. Rakyat banyak yang lebih memilih untuk menjual suara mereka demi beberapa peso untuk ‘memperbaiki atap’ di rumah-rumah mereka atau membeli kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan.⁴⁰ Jika dikaitkan dengan teori yang dijadikan acuan, hal ini memperlihatkan adanya sikap apatis dari rakyat yang mana mereka tidak memedulikan siapa pemimpin yang mereka pilih dan memprioritaskan uang yang dapat didapatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Membahas mengenai pemilihan umum, terlihat juga latar belakang dibalik sikap apatis yang dimiliki oleh rakyat mengenai pemilihan umum mereka. Di tahun 2022, hanya enam daerah pemilihan yang melaporkan *voter turnout* yang melebihi 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hak memilih oleh rakyat tidak maksimal dan partisipasi mereka dalam pemilihan umum tidak menjadi suatu urgensi yang ada dalam kesadaran para rakyat. Tidak hanya itu, bahkan ada daerah-daerah yang hanya melaporkan hasil suara resmi sebesar 30.1 dan 29.02 persen, yang tentunya merupakan angka yang rendah dalam sistem yang berorientasi pada partisipasi rakyat.⁴¹

Melihat kebelakang, *trend* dari *voter turnout* yang dapat dibilang cukup rendah ini ternyata telah mengalami kenaikan dibandingkan *voter turnout* tahun-tahun sebelumnya, contohnya adalah *voter turnout* pemilihan presiden di tahun 2014 yang hanya menginjak angka 47.90 persen.⁴² Mengaitkannya kembali dengan Teori *Iron Law of Oligarchy*, terdapat apatisitas dalam diri rakyat yang diakibatkan oleh kampanye yang diwarnai dengan skandal dan kekerasan. Tidak hanya itu, rakyat selama ini berada di bawah kepemimpinan yang korup sehingga banyak rakyat yang pesimis akan kemungkinan perubahan yang terjadi. Tahun 2022, *voter turnout* semakin tinggi karena adanya janji-janji radikal yang sebelumnya tidak muncul dari presiden-presiden yang korup, tetapi tetap

³⁸ Darcy Leach, “International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ed. James Wright (Peoria, Illinois: Elsevier, 2015), 201-206.

³⁹ Handyman merupakan istilah untuk menggambarkan makelar suara dalam pemilihan umum.

⁴⁰ Adriaan Alsema, “Buying Colombia’s Local Elections: A User’s Manual,” *Colombia News | Colombia Reports*, October 22, 2019, <https://colombiareports.com/amp/buying-colombias-local-elections-a-users-manual/>.

⁴¹ Teresa Romero, “Voter Turnout by District in the Colombian 2022 Presidential Election Primaries,” *Statista*, 31 Mei, 2022, <https://www.statista.com/statistics/1311155/voter-turnout-department-colombian-presidential-elections-primaries/>.

⁴² International IDEA, “Colombia,” *International IDEA*, 2022, <https://www.idea.int/data-tools/country-view/82/40>.

dalam angka yang belum mencapai setidaknya 60%. Tentu dari fakta ini terlihat bahwa eksklusivitas tahun 2022 pun tidak cukup untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif secara drastis. Maka dari itu, terlihat bahwa ada pola yang menyebabkan apatisitas rakyat, yaitu keputusan rakyat akan perubahan yang mungkin karena calon yang cenderung sama dengan pola korupsi yang sama.

Terdapat dilema yang juga dialami oleh rakyat di Kolombia dikarenakan oleh keberadaan demokrasi yang tidak menyeluruh. Dalam demokrasi, terdapat elemen Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana penghargaan dan penghormatan atas kebebasan dan hak mau itu dalam aspek politik, ekonomi, ataupun secara fisik, perlu dijunjung tinggi. Sebaliknya, demokrasi juga menjadi wadah untuk memelihara lingkungan yang dapat membangun dan mempertahankan perkembangan kondisi juga kesadaran akan pentingnya HAM.⁴³ Namun, ketika melihat kembali tahun-tahun keberadaan demokrasi di Kolombia, dapat terlihat bahwa unsur esensial HAM dalam demokrasi tidak terwujud dengan penuh.

Hal ini terlihat dari pandemi COVID-19 yang terjadi bahwa dengan nihilnya campur tangan pemerintah dalam menangani kondisi pandemi yang memburuk, maka para mafia adalah pihak yang turun tangan. Namun, permasalahannya adalah cara mereka dalam menangani pandemi yang melanggar HAM, seperti membunuh orang-orang yang tidak menaati protokol kesehatan. Tetapi, para rakyat tidak berlutut hanya karena rasa takut, karena satu-satunya pihak yang bertindak adalah para mafia.⁴⁴ Di sisi lain, terdapat juga kecenderungan apologis pada kelompok-kelompok ini karena mereka yang 'membukakan pintu' pada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun demokrasi memburuk, tetapi rakyat tidak ada pilihan selain menerimanya terutama dalam waktu darurat karena sistem ini adalah tindakan satu-satunya yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap rakyat. Jika dihubungkan dengan teori yang digunakan, terlihat bahwa adanya sebuah sikap apatis yang muncul dari keterbatasan atau keterdesakan. Maka dari itu, rakyat tidak mempedulikan siapa yang menduduki kursi jabatan, melainkan siapa yang dapat mengambil aksi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibangun, dapat diketahui bahwa represi pemerintah adalah faktor utama yang menyuburkan polarisasi, radikalisasi, dan beralih ke militansi dalam kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi pada penolakan terhadap demokrasi partisipatif dan membiarkan minoritas oligarki merebut kendali organisasi. Aktor-aktor individu maupun kolektif (organisasi) dari konteks yang berbeda telah mengganggu hasil yang diinginkan ini dan mereka melakukannya karena berbagai motif, termasuk ideologi, doktriner, ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang membuat Kolombia turut menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan demokrasi akibat adanya para elit yang berkuasa.

Pertama, adanya tekanan dari kekuasaan para elit, salah satunya oleh kartel narkoba sehingga sering terjadi keputusan atau kebijakan yang diberlakukan secara sepihak dengan mengabaikan pemerintah resmi dan suara-suara masyarakat sipil. *Kedua*, gembong serta kriminal yang memimpin

⁴³ "Democracy," *United Nations*, 12 Juli 2022, <https://www.un.org/en/global-issues/democracy>.

⁴⁴ Joe Danie, "Colombian Cartels Killing Those Who Don't Obey Their Covid-19 Lockdowns," *The Guardian*, 15 Juli 2022, <https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/15/colombia-cartels-rebel-groups-coronavirus-lockdown-human-rights-watch>.

gerakan-gerakan pelanggaran hukum ini menjadi persoalan dalam kegagalan politik domestik Kolombia karena mereka mengkooptasi dan mengintegrasikan penguatan kekuatan politik eksternal, sehingga mengeliminasi proses demokrasi dengan melancarkan sebuah kekerasan dan represi, sambil mempertahankan kontrol formal-institusional atas kelompok-kelompok kriminal yang bersenjata demi kepentingan tertentu. *Ketiga*, sikap rakyat Kolombia yang cenderung apatis terhadap sistem pemerintahan yang ada, terlihat dari ketidakpedulian mereka terhadap pemimpin yang dipilih saat pemilu. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, banyaknya skandal, kekerasan, dan pemerintahan korup membuat rakyat pesimis, serta keterbatasan pilihan akan siapa yang bertindak dalam pemerintahan.

Melihat mulai tumbuhnya benih-benih reformasi demokrasi yang merupakan hasil dari pemilihan umum 2022 di Kolombia, terdapat beberapa saran yang dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai kemungkinan dan sistematika jika diaplikasikan oleh pemerintah di Kolombia dalam rangka mengembangkan erosi demokrasi yang terjadi di Kolombia. Pertama, perlu ada optimalisasi pendekatan pada anak muda seperti simulasi pemilihan umum tidak resmi untuk menanamkan percikan-percikan semangat demokrasi. Hal ini dilihat berpotensi untuk diaplikasikan untuk mengembangkan demokrasi di Kolombia karena eksposur media sosial yang dipegang oleh anak muda dan semangat jiwa aktivisme anak muda dalam menuntut demokrasi yang transparan. Selain itu, mengingat apa yang telah disebutkan juga oleh Gustavo Petro, dapat ditelusuri juga kemungkinan permintaan bantuan dari pemerintah Kolombia pada organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk komisi yang serupa dengan International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) untuk menginvestigasi dan menangkap para oknum-oknum yang korup.⁴⁵

⁴⁵ Adriaan Alsema, "Why State Mafia Allies Threaten Colombia's Democracy," Colombia News | Colombia Reports, 23 Mei 2022, <https://colombiareports.com/why-state-mafia-allies-threaten-colombias-democracy/>.

Referensi

- Alexander, Inigo. (12 Mei 2022). "Terrifying': Days of Terror under Colombia's Gulf Clan Cartel." Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/terrifying-days-of-terror-under-colombias-gulf-clan-cartel>
- Alsema, Adriaan. (22 Oktober 2019). "Buying Colombia's Local Elections: A User's Manual." Colombia News | Colombia Reports.
<https://colombiareports.com/amp/buying-colombias-local-elections-a-users-manual/>
- Alsema, Adriaan. (23 Mei 2022). "Why State Mafia Allies Threaten Colombia's Democracy." Colombia News | Colombia Reports.
<https://colombiareports.com/why-state-mafia-allies-threaten-colombias-democracy/>
- Aviles, William. (2006). "Paramilitarism and Colombia's Low-Intensity Democracy." *Journal of Latin American Studies*, 38(2), 579-408. <https://doi.org/10.1017/s0022216x06000757>
- Bagley, Bruce. (Agustus 2012). "Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in The." WOODROW WILSON CENTER UPDATE ON THE AMERICAS.
[https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/AmericaEconomia%20\(SKP's%20Articles\)/11-2011_Drug_Trafficking.pdf](https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/AmericaEconomia%20(SKP's%20Articles)/11-2011_Drug_Trafficking.pdf)
- Bailey, Normal A. (2018) "La Violencia in Colombia." *Journal of Inter-American Studies* 9, no. 4: 561-575. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/164860>
- Freedom House. (10 Juli 2022). "Colombia." Freedom House.
<https://freedomhouse.org/country/colombia/freedom-world/2022>
- McDermott, Jeremy. "Colombia Elites and Organized Crime: 'Don Berna'." (3 Februari 2020). InSight Crime.
<https://insightcrime.org/investigations/colombia-elites-and-organized-crime-don-berna/>
- Constitución Política de Colombia.*, (1991).
- Daniels, Joe. (15 Juli 2020). "Colombian Cartels Killing Those Who Don't Obey Their Covid-19 Lockdowns." The Guardian.
<https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/15/colombia-cartels-rebel-groups-coronavirus-lockdown-human-rights-watch>
- Daniels, Joe. (8 Mei 2022). "'It's Total Terror': Colombian Cartel Retaliates over Kingpin's Arrest." The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/gulf-clan-cartel-armed-strike-colombia-otoniel-dairo-antonio-usuga>
- United Nations. (12 Juli 2022). "Democracy." <https://www.un.org/en/global-issues/democracy>
- Farah, Douglas. (10 April 1998). "Colombian Rebels Seen Winning War." The Washington Post.
<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1998/04/10/colombian-rebels-seen-winning-war/90b463f0-bcdf-4749-ae0f-fe6ac43efa69/>
- Groves, Roderick T. (1974). "The Colombian National Front and Administrative Reform." *Administration & Society*, 6(3), 316-336.
<https://doi.org/10.1177/009539977400600303>

- Hartlyn, Jonathan. (1993). "Drug Trafficking and Democracy in Colombia in the 1980s.", 10.
- Hylton, Forrest. (2006). *Evil Hour in Colombia*. London: Verso.
- Leach, Darcy. (2015). "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Ed. James Wright. Peoria, Illinois: Elsevier.
- Lee, Rensselaer W. and Thoumi, Francisco E. (1999) "The Political-Criminal Nexus in Colombia." *Trends in Organized Crime* 5(2), 59-84. <https://doi.org/10.1007/s12117-999-1034-1>
- Michels, Robert. (2018) *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Kitchener, Ontario: Andesite Press.
- Moskowitz, Eli. (2020), "Colombia: Former General Jailed for Aiding Narco-Trafficking Group." OCCRP.
<https://www.occrp.org/en/daily/12237-colombia-former-general-jailed-for-aiding-narco-trafficking-group>
- Murillo-Castano, Gabriel and Gomez-Segura, Victoria. (2005). "Institutions and Citizens in Colombia: The Changing Nature of a Difficult Relationship." *Social Forces*, 84(1), 2-4. <https://doi.org/10.1353/sof.2005.0116>
- Nodia, Ghia. (2020). "Democracy's Inevitable Elites." *Journal of Democracy*, 31(1), 75-87. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0006>
- Rambaran, Vandana. (16 Juli 2020). "Colombian Cartels Killing Anyone Who Doesn't Obey Coronavirus Lockdown Orders: Report." Fox News.
<https://www.foxnews.com/world/colombian-cartels-coronavirus-lockdown-orders>
- Richter, Paul dan Miller, Greg. (25 Maret 2007). "Colombia Army Chief Linked to Outlaw Militias." Los Angeles Times.
<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-mar-25-fg-colombia25-story.html>
- Rohrschneider, Robert. (1994) "How Iron Is the Iron Law of Oligarchy?." *European Journal of Political Research*, 207-238.
- Sharpe, Kenneth E. (1993). "The military, the drug war and democracy in Latin America: What would Clausewitz tell us?." *Small Wars & Insurgencies*, 4(3), 56-86, DOI: 10.1080/09592319308423057
- Sullivan, John P. dan Bunker, Robert J. (2002). "Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords." *Small Wars & Insurgencies* 13(2), 40-53, <https://doi.org/10.1080/09592310208559180>
- U.S. Attorney's Office (USAO). (2008). "LEADER OF COLOMBIAN TERRORIST ORGANIZATION AUC PLEADS GUILTY TO NARCOTICS TRAFFICKING CHARGES." USDOJ: US Attorney's Office - Southern District of New York.
<https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/index0212.html>
- United Nations. "Democracy." United Nations. United Nations.
<https://www.un.org/en/global-issues/democracy>. [Diakses 12 Juli 2022].
- Vargas, Juan F. (2022). "Colombia: Democratic but Violent?" *SSRN Electronic Journal*, 14-16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4012757>

